

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Akrial, Zul, 2010, *“Kemerdekaan Profesionalisme Jaksa Sebagai Penuntut Umum : Analisis Terhadap Kebijakan Rencana Tuntutan (Rentut)”* Problematika Penegakan Hukum, Kajian Reformasi Lembaga Penegak Hukum, Perpustakaan Nasional RI dan Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Apeldorn, L. J. Van, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Arief, Basrief, 2013, *“Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana” Menata Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Gaung Persada Press, Jakarta.

Arrasjid, Chainur, 2001, *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bakhri, Syaiful, 2009, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum (P3IH) Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Jakarta dan Total Media, Jakarta.

Effendy, Marwan., 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2012, *Sistem Peradilan Pidana Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Referensi (GP Press Group), Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2014, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi (Gaung Persada Press Group), Jakarta.

Garner, Bryan A, 2004, *Black’s Law Dictionary Eighth Edition*, Thomson Business, St. Paul - United State of America.

Hamzah, Andi dan RM Surachman, 2015, *Pre Trial Justice dan Discretionary Justice Dalam KUHP Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hamzah, Andi, 2013, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

- \_\_\_\_\_, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2015, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, 2012, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2016, *Prinsip – Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Kaligis, O.C., 2006, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberantasan Korupsi*, Alumni, Bandung.
- Kuffal, H.M.A, 2005, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Press, Malang.
- Manthovani, Reda, 2017, *Kumpulan Catatan Hukum*, Buana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Maringka, Jan S, 2017, *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marsita G, BD. Dkk., 2000, *Posisi Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Lebih Menjamin Perwujudan Keadilan dan Kepastian Hukum*, Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Kejaksaan Agung RI, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2011, *Implementasi Dominus Litis Penuntutan Dalam Kewenangan Kejaksaan*, Miswar, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2015, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

- Muhammad, Abdulkadir., 2004, *Hukum dan Penelitian, cetakan 1*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nasution, Adnan Buyung, 2011, *Demokrasi Konstitusional*, Kompas, Jakarta.
- Nitibaskara, TB. Ronny Rahman, 2007, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1987, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*”, Bina Aksara, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti.
- Ramelan, 2006, *“Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi”*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta.
- Santoso, Topo, 2000, *Polisi dan Jaksa : Keterpaduan atau Pergulatan?*, Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, Depok.
- Simanjuntak, Osman, 1995, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soeparmono, R, 2016, *Keterangan Ahli & Visum et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Soeroso, R, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tanya, dkk., Bernard L, 2013, *Teori Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Termorshuizen, Marjanne, 2002, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Djambatan (Cetakan Kedua), Jakarta.
- Utomo, H. Warsito Hadi, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2006, *Masalah Tindak Pidana dan Upaya Penegakan Hukum*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta.

Wiradipradja, E. Saefullah, 2016, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Cetakan Ke-2*, Keni Media, Bandung.

## **B. Peraturan Perundang – undangan dan Peraturan Lainnya**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

*Herziene Inlands Reglement (HIR).*

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kepolisian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2289).

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana/KUHAP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01.PW.07.03 TH.1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-518/A/J.A/11 2001 tanggal 01 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung

Republik Indonesia Nomor : KEP-132/J.A/11/1994 tanggal 07 November 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XIII/2015.

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : B-401/E/9/93 tanggal 8 September 1993 tentang Pelaksanaan Tugas Pra Penuntutan.

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : B-256/E/Epo.1/6/1998 tanggal 26 Juni 1998 perihal Pemberian Perpanjangan Penahanan.

*United Nations Guidelines on the Role of Prosecutors, Adopted by 8<sup>th</sup> Crime Congress, Havana 27 August - 7 September 1990.*

*United Nations Economic and Social Council E/CN.15/2008/L.10/Rev.2 17 April 2008, Commission on Crime Prevention And Criminal Justice, Seventeenth Session, Vienna 14-18 April 2008, Annex, Standards of Professional Responsibility and Statement of the Essential Duties and Rights of Prosecutors.*

### **C. Jurnal, Karya Ilmiah, Internet dan Sumber Lain.**

Abdullah, Rahmat Hi, 2016, "Penguatan Fungsi Kejaksaan Agung Sebagai Pengendali Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Aqsa, Alghiffari (Direktur LBH Jakarta), 2016, "Kata Pengantar Direktur LBH Jakarta pada Penelitian Pelaksanaan Mekanisme Pra Penuntutan di Indonesia Sepanjang Tahun 2012-2014, Pra Penuntutan Sekarang, Ratusan Ribu Perkara Disimpan, Puluhan Ribu Perkara Hilang", *Hasil Penelitian*, LBH Jakarta dan MaPPI FH UI, Jakarta.

Basir, Abdul, 2013, "Eksistensi Asas Diferensiasi Fungsional Antara Polisi Dan Jaksa Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Serta Pengaruhnya

Terhadap Sistem Peradilan Pidana”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Detiknews, “Salah Tangkap Kembali Berulang, Brian Dibui 141 Hari di Magelang”, <http://news.detik.com/berita/d-3482385/salah-tangkap-kembali-berulang-brian-dibui-141-hari-di-magelang>, diakses pada tanggal 04 Oktober 2017.

Gunarto, Marcus Priyo, “Faktor Historis, Sosiologis, Politis dan Yuridis Dalam Penyusunan RUU HAP”, *Mimbar Hukum*, Volume 25, Nomor 1, Februari 2013.

Hiariej, Eddy O.S., “Kejaksaan Sebagai Dominus Litis”, *Makalah Pidato*, Rapat Kerja Teknis Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, 09 Mei 2018.

Hukumonline, “Ahli Ungkap Kejanggalkan Proses Penyidikan Polri”, <http://hukumonline.com/berita/baca/lt56fa/639b7dd90/ahli-ungkap-kejanggalkan-proses-penyidikan-polri>, diakses tanggal 18 Maret 2018.

Hukum online, “Salah Vonis, Akibat Kesalahan Berjamaah Para Penegak Hukum”, <http://hukumonline.com/berita/baca/hol20041/salah-vonis-akibat-kesalahan-berjamaah-para-penegak-hukum>, diakses pada tanggal 14 Februari 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <http://kbbi.web.id/bijak>, diakses pada tanggal 07 Mei 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <http://kbbi.web.id/jaksa>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2017.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <http://kbbi.web.id/kendali>, diakses pada tanggal 13 Februari 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <http://kbbi.web.id/manfaat>, diakses pada tanggal 10 Januari 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <http://kbbi.web.id/wiki/narasumber>, diakses pada tanggal 22 Juli 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <http://kbbi.web.id/tangan>, diakses pada tanggal 13 Februari 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <http://kbbi.web.id/perkara>, diakses pada tanggal 13 Februari 2018.

Kamus Hukum Online, <http://kamushukum.web.id/arti-kata/kepastianhukum>, diakses pada tanggal 22 Juli 2018.

Kejaksaan, “Sejarah”, [http://www.Kejaksaan.go.id/profil\\_Kejaksaan.php?id=3](http://www.Kejaksaan.go.id/profil_Kejaksaan.php?id=3), diakses pada tanggal 03 Oktober 2017.

Kompas, “Demi Kepastian Hukum, Peran Penuntut Umum dalam Penyidikan Perlu Diperkuat”,  
<http://nasional.kompas.com/read/2016/03/27/21460231/demi.kepastian.hukum.peran.penuntut.umum.dalam.peyidikan.perlu.diperkuat>, diakses pada tanggal 14 Februari 2018.

Maringka, Jan S., “Kewenangan Kejaksaan Sebagai Dominus Litis Menyongsong Pembaruan Hukum Acara Pidana”, *Teropong*, Vol.3, Juli – Desember 2015.

Maringka, Jan S., “Sejarah Kejaksaan Sejak Kerajaan Majapahit Hingga Zaman Sukarno”, <http://news.liputan6.com/read/2321930/sejarah-Kejaksaan-sejak-kerajaan-majapahit-hingga-zaman-sukarno>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2017.

Saputro, Adery Ardhan (Peneliti MaPPI FH UI), “Peran Kejaksaan RI Sebagai Dominus Litis dalam Kekisruhan KPK vs Polisi”, <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2015/10/PERAN-KEJAKSAAN-RI-SEBAGAI-DOMINUS-LITIS-DALAM-KEKISRUHAN-KPK-VS-POLRI-finalisasi.pdf>, diakses pada tanggal 03 Oktober 2017.

Satria, Hariman, 2011, “Penggunaan Alasan Sosiologis Dasar Terbitnya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Oleh Kejaksaan Kaitannya Dengan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sumardjono, Maria SW, “Metodologi Penelitian Ilmu Hukum”, *Bahan Kuliah*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014.

Triatmodjo, Marsudi, “Teori Hukum”, *Bahan Materi Kuliah*, Kelas Magister Ilmu Hukum, Jakarta, 2016.

Wikipedia, [http://wikipedia.org/wiki/subjek\\_penelitian](http://wikipedia.org/wiki/subjek_penelitian), diakses pada tanggal 22 Juli 2018.